

## UPAYA ANTISIPASI GEJOLAK HARGA BERAS DI AKHIR TAHUN 2019

Niken Paramita Purwanto

19

### Abstrak

*Kemarau panjang dinilai mengganggu produksi komoditas beras. Jadwal tanam mundur dan terganggu, sementara luas panen dan produksi berkurang. Kekeringan menyebabkan naiknya harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) yang pada akhirnya akan berimbas pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kebutuhan beras nasional mencapai 2,3-2,4 juta ton per bulan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga beras yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2019 akibat musim kemarau yang panjang. Untuk mengantisipasi kebutuhan beras nasional pemerintah sudah mempersiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi agar produktivitas komoditas beras tetap tinggi dengan sejumlah program terobosan yang selama ini sudah dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras nasional serta menyakini bahwa stok yang dimiliki Bulog masih mencukupi. DPR-RI dalam hal ini dapat melakukan pengawasan dan koordinasi dengan mitra kerja terhadap ketersediaan beras nasional dengan mengawasi ketersediaan pasokan beras nasional serta kebijakan impor beras.*

### Pendahuluan

Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan yang telah menimbulkan masalah terkait stabilisasi harga, pengelolaan cadangan beras pemerintah, dan kesejahteraan petani sebagai produsen. Salah satu permasalahan terkait kebijakan tersebut adalah minimnya pengadaan gabah/beras oleh Bulog akibat kekeringan yang melanda sebagian besar sentra produksi beras di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Realisasi

pengadaan beras oleh Bulog dalam periode Januari–September 2019 hanya mencapai 1,04 juta ton atau 57,7% dari target 1,8 juta ton. Lahan yang terdampak dan mengalami gagal panen pada Januari–Oktober 2019 lebih luas bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 (Kompas, 16 September 2019).

Beras merupakan salah satu jenis komoditas pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Preferensi penduduk terhadap beras demikian besarnya, bahkan penduduk yang mempunyai pola pangan pokok non-beras beralih



ke beras karena beras dianggap merupakan sumber karbohidrat dan protein utama. Di samping itu, beras juga dianggap memiliki citra pangan yang lebih baik secara sosial. Kondisi tersebut menyebabkan komoditas beras mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan perekonomian nasional.

Kebutuhan beras nasional saat ini mencapai 2,3-2,4 juta ton per bulan. Kemarau panjang menjadi ancaman tersendiri dari tahun ke tahun bagi sektor pertanian terutama komoditas beras. Kemarau panjang dinilai mengganggu produksi komoditas beras. Jadwal tanam mundur dan terganggu, sementara luas panen dan produksi berkurang. Oleh karena itu pemerintah perlu memetakan stok yang akurat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga beras yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 akibat paceklik yang panjang. Artinya tanpa didukung stok beras nasional akan terjadi gejolak harga beras pada akhir 2019 hingga awal 2020.

Harga komoditas beras mencatatkan inflasi di kala sektor bahan makanan mencatatkan deflasi

hingga 1,97% pada September 2019. Kenaikan harga di komoditas ini dinilai merupakan imbas dari minimnya produksi. Tabel 1 menunjukkan sejak awal tahun 2019, inflasi pada beras mengalami tren yang meningkat hingga bulan September 2019, dan diproyeksikan terus berlanjut dengan lejiton yang cukup tinggi pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020.

Kekeringan menyebabkan naiknya harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) yang pada akhirnya akan berimbas pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Per September 2019, harga GKP di tingkat petani tercatat di level Rp4.905 per kg. Berdasarkan BPS, harga GKP meningkat 3,07% dari bulan sebelumnya sebesar Rp4.759 per kg. Hal yang sama terjadi pada GKG yang naik jadi Rp5.392 dari yang sebelumnya tercatat Rp5.309 (wartaekonomi.co.id, 16 Oktober 2019).

Kenaikan harga GKP dan GKG sudah berlangsung selama lima bulan terakhir dan diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun walaupun kenaikan harga

**Tabel 1. Inflasi Indeks Harga Konsumen, Januari-September 2019**

Deskripsi	Inflasi, %
September 2019	3.39 %
Agustus 2019	3.49 %
Juli 2019	3.32 %
Juni 2019	3.28 %
Mei 2019	3.32 %
April 2019	2.83 %
Maret 2019	2.48 %
Februari 2019	2.57 %
Januari 2019	2.82 %

Sumber: Bank Indonesia

tersebut tidak signifikan. Adanya perayaan Natal dan tahun baru pada akhir tahun 2019 membuat kebutuhan beras nasional akan terus meningkat, sementara sudah tidak ada musim panen raya dan akan memengaruhi penyerapan gabah petani yang akan berkurang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga beras yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2019 akibat musim kemarau yang panjang.

### **Faktor Yang Memengaruhi Pergerakan Harga Beras**

Harga komoditas beras merupakan salah satu komoditas yang pergerakan harganya terus dipantau dan diintervensi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena harga beras memberi kontribusi pada ketahanan pangan, kemiskinan, stabilitas makro ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Pergerakan harga beras sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *pertama*, ketersediaan beras itu sendiri yang bersumber dari hasil produksi panen para petani padi di daerah sentra produksi. Ketersediaan beras ini juga sangat dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti perubahan iklim yang terjadi yang berdampak terhadap produksi, produktivitas, dan pergeseran musim tanam dan musim panen; adanya serangan hama penyakit; dan luas lahan panen. Di samping itu ketersediaan stok beras di Bulog juga mampu memengaruhi harga beras, mengingat Bulog bisa melakukan pembelian dan penjualan secara besar pada komoditas beras.

Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pola pergerakan harga beras yang sama di mana harga beras naik pesat pada bulan Desember hingga

Januari, kemudian turun kembali pada bulan Maret hingga Juni, dan mulai bulan Juli harga beras naik perlahan hingga akhir tahun. Pola pergerakan beras ini terjadi karena musim tanam dan musim panen padi. Pola tanam padi pada musim tanam pertama biasanya terjadi pada bulan November dan panen pada bulan Februari, sehingga mulai bulan Februari harga beras turun dan stabil. Musim tanam kedua biasanya terjadi di bulan Maret dan panen pada bulan Juli, harga beras pada bulan-bulan ini masih stabil hingga bulan Oktober. Musim tanam ketiga mayoritas petani di sejumlah sentra produksi tidak menanam padi karena kurangnya pasokan air. Musim tanam ini merupakan musim kemarau, sehingga petani jarang menanam padi. Inilah yang menyebabkan naiknya harga beras, karena musim ketiga petani tidak menghasilkan beras, sehingga pasokan atau ketersediaan beras hasil panen musim kedua mulai menipis namun tidak diikuti penambahan hasil panen lagi di musim ketiga sehingga pada bulan November dan Desember hingga Januari harga beras setiap tahunnya mengalami tren kenaikan yang cukup tajam.

Musim tanam dan musim panen memengaruhi perubahan luas panen padi yang terjadi pada dalam setahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas panen padi sepanjang Januari-September 2019 mencapai 8,99 juta ha, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu (9,53 juta ha). Adapun produksi beras selama Januari-September turun dari 28,48 juta ton pada tahun 2018 menjadi 26, 91 juta

ton pada tahun 2019 (Kompas, 15 Oktober 2019).

*Kedua*, permintaan dari konsumen, di mana adanya peningkatan dan penurunan permintaan konsumen bisa memengaruhi harga beras terutama dalam menghadapi hari besar nasional, adanya kepanikan/kekhawatiran konsumen akan kelangkaan beras di pasar, serta adanya perubahan pola konsumsi, preferensi dan diversifikasi pangan kebutuhan pokok konsumen.

*Ketiga*, distribusi yang menyebabkan munculnya biaya distribusi yang dikeluarkan sesuai dengan jarak dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Selain itu, kebijakan pemerintah juga mempunyai andil dalam pergerakan harga beras antara lain kebijakan impor-ekspor beras, kebijakan pembelian dan penjualan beras dengan harga tertentu yang dilaksanakan oleh Bulog.

### **Kebijakan dan Antisipasi Pemerintah**

Pemerintah menyakini bahwa untuk saat ini stok yang dimiliki oleh Bulog masih mencukupi. Namun demikian, tidak bisa terlepas dari sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tingkat produktivitas beras tetap tinggi saat musim kemarau. Bulog juga perlu berinovasi agar proses serapan beras bisa berjalan lancar dan memenuhi target. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain (a) membangun pola pikir bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa olah, dan tiada hari tanpa panen; (b) mentransformasi pertanian tradisional menjadi

pertanian modern; (c) memperbaiki tata kelola air; dan juga (d) membangun embung. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyatakan stok beras mencukupi kebutuhan hingga Maret 2020. Indikator saat ini stok beras di Bulog masih sekitar 2,5 juta ton. Penyerapan beras berkisar 3.000-4.000 ton perhari, sedangkan jumlah beras yang keluar sebanyak 2.000-3.000 ton per hari. Artinya keseimbangan stok masih terjaga (Kompas, 15 Oktober 2019).

Kebijakan lain yang dilakukan guna menstabilkan harga beras adalah mengadakan operasi pasar. Dalam hukum ekonomi, kenaikan harga sangat dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan, di mana permintaan semakin meningkat namun jika tidak diikuti dengan pasokan yang meningkat pula, maka berdampak pada kelangkaan komoditas tersebut di pasar, hal ini yang menyebabkan harga menjadi naik, untuk menurunkan harga barang tersebut tentunya diperlukan cara dengan menambah pasokan.

Dalam operasi pasar, pemerintah menjual komoditas pokok tersebut dengan harga yang murah di bawah harga pasar yang berlaku, bahkan bisa sangat lebih murah karena adanya subsidi pemerintah. Hal-hal tersebut tentunya ditempuh guna mengefektifkan kegiatan operasi pasar dalam menurunkan harga komoditas pokok ini. Tentunya operasi pasar akan efektif ketika harga bergerak turun. Pasokan beras yang telah disalurkan oleh pemerintah dalam operasi pasar tahun 2018 sebanyak 544.649 ton

beras, sementara pada tahun 2019, rata-rata pasokan beras yang disalurkan sebesar 7.000-8.000 ton per hari dan akan ditingkatkan dengan target 15.000 ton per hari (industri.kontan.co.id, 24 September 2019).

Operasi pasar beras digelar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Lima provinsi dengan tingkat kuantitas tertinggi penggunaan beras sebagai komoditas utama operasi pasar adalah di DKI Jakarta, Lampung, Aceh, Riau dan NTT (bisnis.tempo.co, 4 Oktober 2019). Tentunya dalam operasi pasar beras, banyaknya volume dan pemilihan lokasi provinsi sangat mempertimbangkan tingginya tingkat penyerapan konsumsi beras, serta tingginya disparitas harga beras dibanding dengan harga beras standar rata-rata eceran tertinggi nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras

### **Penutup**

Upaya antisipasi pemerintah perlu terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar. Namun, penghitungan stok secara cermat penting dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok tetap terpenuhi. Dalam jangka pendek, perlu konsolidasi antara pemerintah dan pelaku usaha sektor pangan, tak cukup hanya melihat stok beras di Bulog yang hanya 8-9%. Konsolidasi ini berupa pendataan stok gabah dan beras yang obyektif, termasuk stok beras yang ada di pedagang dan gudang milik swasta. Selanjutnya pemerintah bersama pelaku usaha

memetakan ketersediaan beras dan gabah secara nasional. Dengan demikian daerah surplus dan defisit terindikasi. Daerah defisit beras harus segera memperoleh penyaluran dari daerah yang surplus terdekat. Apabila stok beras nasional berpotensi defisit maka kebijakan beras impor menjadi pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Untuk solusi jangka panjang, koordinasi antarpihak terkait harus dilangsungkan agar kenaikan ini tidak menjadi kejadian yang akan selalu berulang dari tahun ke tahun. Kembali lagi, ini harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit.

DPR-RI melalui Komisi VI perlu melakukan pengawasan dan koordinasi dengan mitra kerja terhadap ketersediaan beras nasional dengan mengawasi ketersediaan pasokan beras nasional serta kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh pemerintah secara ketat. Bukan hanya sekali pemerintah mengklaim surplus produksi padi dan stok beras, tetapi kelangkaan dan gejolak harga yang terjadi di pasar, dan malah dibarengi impor beras yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

### **Referensi**

"Awat, tanda-tanda Gejolak Harga Beras Kian Dekat", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190903/12/1143967/awat-tanda-tanda-gejolak-harga-beras-kian-mendekat>, diakses 16 Oktober 2019.



- “Dampak Kekeringan Lahan Terdampak Meluas, Petakan Stok Secara Akurat”, Kompas, 15 Oktober 2019, hal. 1.
- “Evaluasi Ulang Kebijakan Perberasan”, Kompas, 16 Oktober 2019, hal. 1.
- “Hadapi Kemarau Panjang, Bagaimana Kondisi Stok Beras Nasional”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read250037/hadapi-kemarau-panjang-bagaimana-kondisi-stok-beras-nasional.html>, diakses 16 Oktober 2019.
- “Harga Beras Mulai Naik, Bulog Lakukan Operasi Pasar”, <https://industri.kontan.co.id/news/harga-beras-mulai-naik-bulog-lakukan-operasi-pasar-untuk-stabilkan-harga>, diakses 20 Oktober 2019.
- “Harga Beras Naik, Mendag Minta Buwas Gelar Operasi Pasar”, <https://bisnis.tempo.co/read/1255919/harga-beras-naik-mendag-minta-buwas-gelar-operasi-pasar>, diakses 16 Oktober 2019.
- “Kajian Konsumsi Bahan Pokok 2017”, Badan Pusat Statistik.
- “Kekeringan dan Harga Beras”, Kompas, 16 Oktober 2019, hal. 6.
- “Pemerintah Segera Antisipasi Gejolak Harga Beras Akhir Tahun”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read250226/dear-pemerintah-segera-antisipasi-gejolak-harga-beras-di-akhir-tahun.html>, diakses 16 Oktober 2019.
- “Stok Bulog Tak Mampu Tahan Naiknya Harga Beras”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read249796/stok-bulog-tak-mampu-tahan-naiknya-harga-beras.html>, diakses 16 Oktober 2019.



Niken Paramita Purwanto  
*niken.paramita@dpr.go.id.*

Niken Paramita Purwanto, Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI, dengan kepakaran bidang Kebijakan Publik. Lahir di Jakarta, pada 25 Juni 1977, menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Trisakti, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Indonesia

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.